



JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGUST	SEP	OKT	NOV	DES	2016	HAL: 01
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-------	-----	-----	-----	-----	------	---------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

WACANA
ANGGARAN
TRILIUNAN
RUPIAH UNTUK
PARPOL

Terima Dana Mau, Diaudit Keberatan

JAKARTA-RK. Partai politik bakal dapat kucuran duit cukup besar dari anggaran pendapatan belanja negara (APBN). Namun, tidak semua partai langsung menerima rencana tersebut. Ada beberapa yang belum sepakat, karena penggunaan dana itu akan diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Deputi Bidang Pencegahan KPK Pahala Nainggolan men-

gatakan, pihaknya masih menghitung berapa biaya yang dibutuhkan partai. Mulai dewan pimpinan pusat (DPP) hingga dewan pimpinan daerah di kabupaten/kota.

"Tidak hanya partai di pengurusan pusat saja," terangnya, kepada Jawa Pos, Minggu (25/9).

► Halaman 4



JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGUST	SEP	OKT	NOV	DES	2016	HAL: 09																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

Menurutnya, perwakilan 10 partai sudah dikumpulkan untuk membahas pendanaan itu. Mereka diminta memberikan masukan dan menyampaikan berapa biaya yang selama ini mereka butuhkan.

Dari pertemuan itu, KPK bisa mendapatkan gambaran nilai biaya yang dibutuhkan setiap partai. Tentu tidak sama biaya antara partai satu dengan yang lain.

Di depan para perwakilan partai, Alumnus Sekolah Tinggi Akutansi Negara (STAN) itu juga menyampaikan sistem pencairan dan sistem pengawasan terhadap pengelolaan anggaran yang dicairkan. Dia menjelaskan, dana itu akan diberikan berupa hibah.

Jadi, anggaran dicairkan kepada DPP, selanjutnya pengurus pusat partai akan memberikannya kepada pengurusan partai di masing-masing daerah. Sementara, untuk pengawasannya akan dilakukan aduit setiap tahunnya. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang akan melakukan audit secara rutin.

Pahala mengatakan, dia sudah menyampaikan sistem pencairan dan pengawasan kepada perwakilan. Tampaknya ada beberapa partai yang keberatan jika harus diaudit. Terutama mereka yang mempunyai dana besar. Tentu mereka harus mengubah keuangan partai. Hal itu tidak mudah bagai partai.

"Kalau diaudit, semua harus klir," paparnya.

Selain diaudit, pihaknya juga akan menyusun kode etik penggunaan anggaran dan juga sistem rekrutmen partai. Selama ini, rekrutmen partai dilakukan sesuai dengan keinginan petinggi partai. Dia belum mengetahui seperti kode etiknya,

karena sekarang masih dibahas.

Mantan pegawai Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Bali itu mengatakan, dengan pendanaan yang dilakukan pemerintah, maka partai tidak lagi mengandalkan uang dari kader. Kader tidak lagi ditekan untuk mencari uang untuk partai.

Selama ini, ada kader yang melanggar hukum saat mencari uang untuk partai. Jika partai sudah didanai pemerintah, maka hal itu tidak boleh terjadi lagi.

Rencana pendanaan untuk partai itu sudah disampaikan ke Komisi III DPR RI. Mereka banyak yang menyambut baik dengan rencana itu. Bahkan, ada anggota dewan yang mengeluh karena selama ini harus mencari uang untuk partai. Jika sudah didanai pemerintah, mereka tidak perlu lagi mencari uang.

Berapa anggaran yang dibutuhkan untuk pendanaan partai? Pahala mengatakan, sebelumnya muncul angka Rp1 triliun. Tapi, angka itu hitungan kasar. Pahala menyatakan, perkiraan sementara, anggaran yang dibutuhkan untuk pendanaan partai bisa mencapai Rp3 triliun hingga Rp5 triliun.

Jadi, setiap partai bisa mendapatkan kucuran dana sekitar Rp 300 miliar sampai Rp 500 miliar pertahun. Angka itu belum final dan masih terus dikaji.

"Angka perkiraan sementara segitu," terangnya.

Dana itu digunakan untuk biaya operasional rutin dan pendidikan politik. Selama ini, partai mengeluarkan dana cukup besar. Terutama saat pemilihan kepala daerah (Pilkada). Dana yang akan dikeluarkan akan semakin besar ketika pemilihan presiden (Pilres).

Pahala mengatakan, setelah kajian



JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGUST	SEP	OKT	NOV	DES	2016	HAL. 09
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-------	-----	-----	-----	-----	------	---------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

pendanaan partai selesai, hasilnya akan diserahkan kepada pemerintah berupa rekomendasi. Pemerintah yang nantinya akan memutuskan pendanaan dengan APBN itu.

"Kami lakukan kajian dengan LIPI. Target tahun ini bisa selesai," beber dia.

Anggota Komisi III DPR RI Jazilul Fawaid mengatakan, kajian pendapaan partai harus cepat diselesaikan. Pihaknya tidak sabar menunggu berapa dana yang akan dikucurkan kepada partai.

"Kami tentu senang kalau pemerintah menyiapkan dana untuk partai," kata politisi PKB itu.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang mengkaji angka Rp1 triliun relevan diberikan pada tiap partai. Dana itu bisa untuk kegiatan Parpol hingga tingkat ranting di kecamatan. Pemberian dana juga bisa didasarkan pada kombinasi antara jumlah keterwakilan di legislatif dan prosentase suara yang didapat partai bersangkutan.

Saut melihat dana parpol penting untuk mencegah korupsi di jajaran legislatif. Dalam pandangannya, celah korupsi di jajaran tersebut terjadi karena adanya tuntutan dari konstituen yang ada di akar rumput.

Ia menilai, dalam banyak kasus sebenarnya para legislator berangkat mencalonkan diri dengan kondisi keuangannya baik. Artinya pendapatan resmi dari menjadi legislator sebenarnya cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Yang jadi masalah, para legislator itu menjadi sapi perahan partai dan konstituen.

"Banyak yang meminta bantuan ke mereka. Mulai dari acara pertemuan

sampai khitanan. Kan tidak mungkin hal itu dipenuhi dari uang yang tiap bulan diberikan pada istrinya," canda Saut di Surabaya, Sabtu (24/5).

Lantaran tak mungkin diambilkan dari gaji, para legislator pun cari pendapatan tak resmi. "Akhirnya ya minta sana-sini yang sumbernya tidak jelas," ujarnya.

Meskipun diperuntukkan bagi konstituennya, penggunaan dana parpol harus diaudit. Siapapun politikus yang memanfaatkan dana itu harus bersedia diaudit.

"Ini juga pembelajaran bagi mereka untuk terbuka dan transparan," tegas Saut. Namun, rasanya praktek tersebut sulit dilakukan. Sebab untuk sekedar menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN)-nya saja, banyak politikus yang sengaja berkecil.

Dalam kunjungannya ke redaksi Jawa Pos ini, Saut banyak memaparkan konsep pencegahan yang dilakukan KPK. Komisi antirasuah itu kini terus menggalakkan keterlibatan masyarakat dalam menamakan nilai-nilai anti korupsi. Salah satunya seperti acara Festival Lagu Suara Antikorupsi 2016.

Festival itu dilakukan bak pencarian bakal penyanyi yang ada di televisi. KPK menggelar audisi di sejumlah kota, Surabaya termasuk di antaranya. Audisi 10 besar regional Surabaya diselenggarakan di Sutos. Dari audisi itu, satu pemenang akan dibawa ke Jakarta untuk dilombakan dengan peserta dari kota lain.

"Para pemenang dari setiap kota itu nanti kita buat video klip. Sedangkan untuk tiga besar tiap kota akan masuk dalam album kompilasi," tutup Saut. (Jawa Pos/JPG)